PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Kedaulatan Rakyat Hari: Sabtu Tanggal: 24 Januari 2015 Halaman: 9

SEPEKAN KAJI REGULASI

Walikota Ancam Nonaktifkan PNS Korupsi

YOGYA (KR) - Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti akhirnya angkat bicara menyangkut bawahannya yang tersandung korupsi. Dalam waktu dekat, Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkot yang dinyatakan sebagai tersangka korupsi akan dinonaktifkan.

Haryadi menilai, regulasi terkait penonaktifan PNS yang menjadi tersangka korupsi itu tengah dikaji. Ditargetkan dalam waktu sepekan ke depan, kebijakan tersebut akan ditentukan. "Minggu depan kajian selesai. Sebelum dinonaktifkan kan perlu dasar. Itu yang kami kaji sekarang," ungkapnya, Jumat (23/1).

Perkara dugaan korupsi yang terbaru menyeret staf Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian (Disperindagkoptan) terkait dana hibah Pemberdayaan Ekonomi Wilayah (PEW). Sebelumnya pengadaan pergola di Badan Lingkungan Hidup (BLH), kemudian pengadaan alat kesehatan di RS Jogja serta honor seniman di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud). Sebagian yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi berstatus PNS.

Haryadi menjelaskan, selaku pejabat pembina kepegawaian, unsur kehati-hatian tetap diterapkan sebelum mengambil keputusan penonaktifan PNS tersangka korupsi. Kendati saat ini bawahannya yang terjerat dugaan korupsi masih bekerja seperti biasa namun tetap dalam pengawasannya. "Kami terus monitor. Bahkan Inspektorat dan Sekda juga ikut memonitor pegawai yang diduga korupsi itu," imbuhnya.

Kendati demikian, Haryadi berharap agar hak-hak hukum tersangka tetap dihormati. Hal itu semata guna menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dalam proses hukum.

Sementara Koordinator Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta Winarta Hadiwiyono mendukung langkah Walikota yang akan menonaktifkan PNS tersangka korupsi. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjadi *shock therapy* bagi jajaran pegawai di lingkungan Pemkot agar menghindari tindakan serta perilaku korupsi. "Seluruh pegawai saat pengambilan sumpah jabatan juga sudah menandatangani pakta integritas. Sumpah itu jangan hanya di lisan atau tulisan saja, tapi harus benar-benar diaplikasikan," terangnya.

(Dhi)-k

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. 2. Forpi	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Mei 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005